

PENERAPAN ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM

PELAYANAN PEMBUATAN SURAT IZIN USAHA

PERDAGANGAN (SIUP)

(Studi di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu

Pintu/BPM-P2TSP Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar

Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

OLEH:

ELLY HERDIYANTI

NIM. 135010118113011



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PENERAPAN ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK
DALAM PELAYANAN PEMBUATAN SURAT IZIN
USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**

(Studi di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu/BPM-P2TSP Kabupaten Kediri)

Identitas Penulis

- a. Nama : ELLY HERDIYANTI
b. NIM : 135010118113011

Konsentrasi

: Hukum Administrasi Negara

Jangka waktu penelitian

: 2 Bulan

Disetujui pada tanggal

:

Pembimbing Utama

Agus Yulianto, SH.MH
Nip. 19590717 198601 1 001

Lutfi Effendi, SH.M.Hum
Nip. 19600810 198601 1 002

Pembimbing Pendamping

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi,SH.M.HUM
NIP.19600810198601 1 002

HALAMAN PENGESAHAN
**PENERAPAN ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM
PELAYANAN PEMBUATAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
(SIUP)**

(Studi di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu

Pintu/BPM-P2TSP Kabupaten Kediri)

**OLEH:
ELLY HERDIYANTI**

135010118113011

Skrripsi ini telah disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama

Agus Yulianto, SH.MH
Nip. 19590717 198601 1 001

Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

Pembimbing Pendamping

Lutfi Effendi, SH.M.Hum
Nip. 19600810 198601 1 002

Mengetahui:
Dekan Fakultas Hukum

Lutfi Effendi,SH.M.Hum.
NIP.19600810198601 1 002

Dr. Rachmad Safa'at,SH.,M.Si
NIP. 19620805198802 1 001



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan judul **Penerapan Asas Pemerintahan Yang Baik Dalam Pembuatan Surat Izin Perdagangan (Studi di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu/BPM-P2TSP Kabupaten Kediri)**

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr.Rachmad Safa'at,SH.,M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Lutfi Effendi,SH.,M.HUM. selaku Ketua bagian Hukum Administrasi Negara, serta selaku dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan banyak kontibusi dalam penyusunan laporan ini yang berupa bimbingan, diskusi,serta arahan dalam pembuatan skripsi ini.
3. Bapak Agus Yulianto,SH,MH. Selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan banyak kontibusi dalam penyusunan laporan ini yang berupa bimbingan,diskusi,serta arahan dalam pembuatan skripsi ini.
4. Bapak Drs.Indra Taruna selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri.
5. Ibu Al Indah,S.sos,MM selaku Kabid Pelayanan Perizinan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri.
6. Bapak Hadi Suyanto dan Ibu Khusnul Khotimah, selaku orang tua penulis yang do'a yang tak henti-hentinya untuk penulis serta dukungan, baik secara moril maupun materiil.
7. Sahabat –sahabat “Srikandi” yang telah memberikan do'a dan, dukungan serta semangat.
8. Semua teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kampus Kediri angkatan 2013, yang telah memberikan do'a dan, dukungan serta semangat.



9. Fendik Andoko.B. yang selalu memberikan saran dan memberikan semangat.
10. Amelia dwi.A selaku adik yang telah memberikan dukungan dan semangat.
11. Semua teman-teman dan pihak-pihak lain yang turut membantu dan mendukung selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan tugas akhir ini.

Akhir kata penulis mohon maaf apabila dalam proses penyusunan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukan jalan yang benar. Penulis berharap dengan penyusunan tugas akhir atau skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kalangan akademis lainnya.

Malang, Januari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar.....	ix
Daftar Lampiran	x
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum tentang Penerapan.....	15
B. Kajian Umum tentang Penerapan asas umum pemerintahan yang baik	16
C. Kajian Umum tentang Aparatur Sipil Negara.....	21
D. Kajian Umum tentang <i>good governance</i>	23



E. Kajian Umum tentang Pelayanan	25
F. Kajian Umum tentang Surat Izin Usaha Perdagangan	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian.....	31
D. Jenis Data dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Populasi, Sampel, danTeknik Sampling.....	35
G. Teknik Analisis Data.....	36
H. Definisi Operasional.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri	38
1. Sejarah dan lokasi BPM-P2TSP.....	38
2. Kedudukan	40
3. Fungsi,Tugas, dan Kewenangan Badan Perizinan.	42
4. Mandat.....	42
B. Penerapan Asas Pemerintahan Yang Baik dalam Pelayanan Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan.....	47
1. Asas umum pemerintahan yang baik	47
2. Penerapan asas pemerintahan yang baik dalam pembuatan SIUP berdasarkan standar oprasional prosedur.....	52
3. Syarat-syarat permohonan surat izin usaha perdagangan	55



4. Data pemohon pembuat Siup pada bulan November 2016	60
C. Faktor pemghambat penerapan asas pemerintahan yang baik dalam pembuatan siup di BPM-P2TSP Kab. Kediri	62
1. Kendala umum	62
2. Kendala khusus	63
D. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penerapan asas pemerintahan yang baik dalam pembuatan surat izin usaha perdagangan	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	70
Daftar Pustaka	
Lampiran	



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kondisi Pegawai menurut Status Kepegawaian	45
Tabel 2. Kondisi Pegawai menurut Kepangkatan dan Jabatan.....	46
Tabel 3. Kondisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan dan Jabatan	46



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPM-P2TSP Kabupaten Kediri

44



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Surat Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri
3. Surat Persetujuan Izin Penelitian Badan Kebangsaan dan Politik Kabupaten Kediri
4. Surat Tugas
5. Surat Permohonan Izin Penelitian dan Wawancara
6. Surat keterangan plagiasi
7. Data –data Pemohon Surat izin usaha Perdagangan



ABSTRAK

Elly Herdiyanti, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Desember 2016, Penerapan Asas Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Agus Yulianto, S.H., M.H., Lutfi Effendi, SH.M.Hum.

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang tinggi dalam proses penyelenggaraan pemerintahannya pemerintah memiliki kewajiban memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya dalam pemenuhan kebutuhan dalam pelayanan publik terutama perizinan pembuatan Surat izin usaha perdagangan. Penyelenggaraan tata kepemerintahan daerah berdasarkan asas pemerintahan yang baik akan menciptakan kondisi yang kondusif bagi aktifitas perekonomian dan perdagangan. Pemerintah Kabupaten Kediri dalam peranan melaksanakan asas pemerintahan yang baik terutama dalam sektor perizinan surat izin usaha perdangan memiliki visi mewujudkan kemudahan berinvestasi melalui pelayanan perizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti dan terjangkau. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri dalam memberikan pelayanan dituntut untuk menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan pembuatan surat izin usaha perdagangan (SIUP).

Peneliti mengangkat permasalahan tentang Penerapan Asas Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPM-P2TSP) Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, metode pendekatan yuridis sosiologis, dan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Dari hasil penelitian dan analisis maka penulis memperoleh hasil penelitian dan jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan yakni (1) Penerapan asas pemerintahan yang baik harus mengacu pada standar operasional prosedur pembuatan dan penerbitan surat izin usaha perdangan. (2) Hambatan yang terjadi di BPM-P2TSP Kabupaten Kediri dalam pembuatan surat izin usaha perdagangan yang bersifat umum Standar Operasional Prosedur (SOP) surat izin usaha perdagangan belum dilaksanakan secara optimal, Sumber daya manusia masih sangat kurang, sedangkan hambatan yang bersifat khusus Pemohon Siup banyak yang tidak melengkapi syarat ,waktu penerbitan siup, dan seharusnya selesai dalam waktu tujuh hari bisa sampai satu bulan , apalagi dengan adanya aturan yang baru bahwa penerbitan siup secara simultan hanya 2 hari kerja, ini belum bisa dilaksanakan,dan masih ada penarikan biaya adminstrasi yang pada aturan tidak menyebutkan adanya. Solusi untuk menyelesaikan hambatan tersebut penambahan pegawai yang berkwalitas, pembuatan peraturan daerah yang mengatur retribusi biaya surat izin usaha perdagangan, dan meningkatkan sarana prasarana yang lebih baik.

Kata Kunci: Penerapan Asas Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan.



APPLYING PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE IN THE SERVICE OF MAKING BUSINESS LICENSE

Elly Herdiyanti, Agus Yulianto, SH, MH, Lutfi Effendi, SH.M.Hum.

UB Faculty of Law

Email: ellyherdiyanti@gmail.com

ABSTRACT

Kediri Regency Government in implementing the principles of good governance, especially in the sector of business licence, has a vision to realize the ease of investment through a licensing service that is fast, easy, transparent, and definitely affordable. Investment Board and Integrated Licensing Services Kediri in providing services is required to implement the principles of good governance in providing the service of making the trading license. Law Number 30 Year 2014 about the Governmental Administration explains that Good Governance Principles are principles used as a reference government employers in issuing decisions and / or actions in the implementation of the Government. The implementation of the principle of good governance should be based on operational standard of manufacturing procedures and the issuance of business license trade. Kediri District Regulation No. 5 year 2013 contains business license (SIUP), company registration (TDP), industrial licence and warehouse registration certificate (TDG). SIUP is a license to undertake business activities. The service for business licence (SIUP) in the Office of Licensing BPM-P2TSP Kediri has a procedure of making the trading license including submission of the application for the applicant, files checking by officers BPM-P2TSP, business location survey by the BPM-P2TSP, approval filing to have the permit from the Regent of the area, and handing out of the business license to the applicant.

Keywords: Implementation of the principle of good governance in the making of the business license.

